

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.3374](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.3374)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 19 Februari 2025 Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR DI KOTA CIMAHI

Yuda Adriansyah¹⁾, Agustina Setiawan²⁾, Waluyo Zulfikar³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Jendral Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian berjudul "pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan dalam penertiban parkir di kota cimahi". fenomena masalah dalam penelitian ini yaitu Belum optimalnya pengendalian penyelenggaraan perparkiran tentang penertiban parkir, oleh karena itu rumusan masalah bagaimana pengendalian penyelenggaraan perparkiran dalam penertiban parkir di kota cimahi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan tersebut. Peneliti menggunakan teori dari Merchant dan Stade terdiri dari beberapa dimensi diantaranya: 1) Pendefinisian dimensi kinerja 2) Mengukur kinerja 3) Membuat target kinerja 4) Membuat skema hukuman. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis meliputi, Dinas Perhubungan. Informan meliputi Kepala seksi perparkiran, Pengelola Perparkiran, Petugas Parkir. Hasil penelitian menunjukan pengendalian penyelenggaraan perparkiran tentang penertiban parkir dalam dimensi membuat target kinerja belum berjalan maksimal, dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara mobil maupun pengendara motor yang tidak tertib dalam larangan parkir di kota cimahi membuat jalannya pengendalian atau penyelenggaraan terhambat

Kata Kunci : Pengendalian, Perparkiran, Penertiban

Abstract

The research is entitled "control of parking management by the transportation department in controlling parking in the city of Cimahi". The problem phenomenon in this research is that parking management is not yet optimal regarding parking control, therefore the problem formulation is how to control parking management in parking control in the city of Cimahi. The aim of this research is to analyze and describe how the transportation agency controls parking management. Researchers use Merchant and Stade's theory consisting of several dimensions including: 1) Defining performance dimensions 2) Measuring performance 3) Creating performance targets 4) Creating punishment schemes. This research is descriptive in nature with a qualitative approach. Data collection techniques through: Observation, interviews and

documentation. Data analysis techniques through data collection, data reduction and drawing conclusions. The unit of analysis includes the Department of Transportation. Informants include the Head of the parking section, Parking Manager, Parking Officer. The results of the research show that the control of parking management regarding parking enforcement in the dimension of making performance targets has not run optimally, can be seen from the number of violations committed by car drivers and motorbike riders who are not orderly in the parking ban in the city of Cimahi making the process of control or implementation hampered

Keywords: Control, Parking, Enforcement

PENDAHULUAN

Parkir menjadi masalah utama karena meningkatnya lalu lintas dan volume kendaraan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap permintaan ruang parkir untuk kawasan tertentu, seperti kawasan bisnis /atau kawasan yang memiliki kegiatan. Maka dari itu parkir menjadi permasalahan besar yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan hasil dari analisa pengumpulan permasalahan parkir di dapat permasalahan yang paling utama pada parkir yaitu ketidakseimbangan antara volume dan kapasitas parkir yang dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti kemacetan, antrian panjang, terganggunya aktifitas lalu lintas, parkir liar dan kecelakaan dari permasalahan parkir didapat kebijakan parkir yaitu, kebijakan tarif parkir, kebijakan pembatasan volume, kebijakan pull and push, penghapusan parkir badan jalan, kebijakan pembatasan waktu dan kebijakan parking rate dalam menyelesaikan permasalahan parkir tidak hanya penyelenggara parkir atau pemerintah.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya, sedangkan berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya pengemudi yang datang dan tidak meninggalkan kendaraannya tetap diminta uang parkirnya oleh juru parkirnya, contoh lainnya adalah terkadang juru parkir tidak memberikan karcis parkir, juru parkir terkadang tidak memiliki kartu identitas dan tidak menggunakan seragam, terkadang saat terjadi kehilangan di tempat parkir tersebut para juru parkir lepas tangan tentang masalah tersebut, tentu hal ini membuat masyarakat yang parkir tidak akan terima dengan tanggung jawab juru parkir tersebut.

Hal-hal demikian yang membuat masyarakat tidak puas dengan cara kerja juru parkir yang ada, sehingga sering sekali masyarakat membantalkan niatnya untuk berhenti di suatu toko atau tempat perbelanjaan yang ada juru parkir dan lebih memilih berhenti di pinggir jalan.

Pengendalian parkir diperlukan untuk mengatur dan mengawasi perparkiran kota, termasuk dalam pengelolaan lahan parkir, dan apabila pengelolaan parkir di suatu kota berjalan dengan baik, bukan hanya akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat saja, akan tetapi parkir dapat juga dapat menjadi salah satu sumber dana yang potensial untuk dikelola dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Perparkiran selalu jadi masalah bagi warga kota cimahi, yang dimana masih banyak warga kota cimahi yang tidak sadar dengan adanya rambu dilarang parkir tetapi masih saja ada yang melanggar rambu tersebut membuat jalan menjadi macet dan mengganggu pengguna pejalan kaki.

Dalam konsep pengendalian menurut Sugiyanto (2016:33) terlepas dari banyaknya cara untuk membuat konsep, komponen berikut ini bisa diidentifikasi sebagai pusat fenomena meliputi: pengendalian adalah proses, pengendalian melibatkan pemimpin, pengendalian pengendalian mencakup pengukuran kinerja, pengendalian melibatkan standar, pengendalian terjadi di dalam organisasi, dan pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai.

Menurut Anthony yang dialih bahasakan oleh Agus Maulana mengemukakan definisi pengendalian sebagai berikut “Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variable untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian merupakan konsep yang luas yang berlaku untuk manusia, benda, situasi dan organisasi. Dasar dari semua pengendalian adalah pemikiran untuk mengarahkan suatu variable, atau sekumpulan variable, guna mencapai tujuan tertentu” (Anthony, 1992:5).

Di dalam ruas jalan setidaknya ada sebuah tempat lahan untuk pengendara roda empat maupun roda dua. Kantong Parkir adalah area atau ruang yang disediakan ditempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, kantor, atau tempat-tempat umum lainnya, tempat dimana orang dapat

memarkirkan kendaraannya mereka, seperti mobil dan sepeda motor, kantong parkir biasanya dilengkapi dengan tanda atau marka yang menunjukan lokasi yang sah untuk memarkir kendaraan, ini membantu mengatur lalu lintas kendaraan dan mencegah parkir sembarangan di tempat-tempat yang tidak sesuai, banyak pengendara roda empat maupun roda dua yang memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak sah yaitu di tempat rambu larangan parkir membuat pengendara lain merasa terganggu. dari pihak DISHUB telah mengawasi pengendara yang sering melanggar aturan tersebut dengan menggunakan sanksi kepada pelanggar dengan sanksi peringatan seperti, surat peringatan, kendaraan tersebut akan di pindahkan secara paksa ke tempat yang semestinya, dan kendaraan tersebut akan di sita oleh pihak DISHUB.

Pemahaman tentang pengendalian menurut Sugiyanto (2016:30) Adalah langkah awal yang sangat penting dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisis serta menarik kesimpulan terhadap suatu objek dalam batasan pengendalian. Pengendalian juga sering disamakan dengan controlling dalam upaya yang telah direncanakan, dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target yang ingin dicapai (Elfrianto, 2017). Dalam konsep pengendalian menurut Sugiyanto (2016:33) terlepas dari banyaknya cara untuk membuat konsep, komponen berikut ini bisa diidentifikasi sebagai pusat fenomena meliputi: pengendalian adalah proses, pengendalian melibatkan pemimpin, pengendalian pengendalian mencakup pengukuran kinerja, pengendalian melibatkan standar, pengendalian terjadi di dalam organisasi, dan pengendalian melibatkan pencapaian kinerja yang seharusnya dicapai.

Untuk mendukung proses Pengendalian tersebut, maka peneliti menggunakan *grand theory* sebagai sebuah pisau asah dalam sebuah penelitian. *Grand theory* ini digunakan sebagai sebuah sarana untuk mencari landasan teori utama yang digunakan sebagai dasar menentukan konsep penelitian yang dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teori, diantaranya:

- A. Teori Pengendalian Hasil menurut Merchant And Stade dalam (Mulyani. 2018:1.14), yang terdiri dari empat dimensi yang

mempengaruhi pengendalian, yaitu: Pendefinisian dimensi kinerja, mengukur kinerja, membuat target kinerja, membuat skema dan hukuman.

1. Pendefinisian dimensi kinerja. Pendefinisian ini diperlukan agar seluruh komponen organisasi dapat memahami apa yang sebenarnya diinginkan. Apabila target yang diinginkan sudah jelas, maka diharapkan dapat memberikan gambaran kepada mereka tentang bagaimana strategi pencapaiannya
2. Mengukur kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang maupun sekelompok organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, sesuai dengan moral dan etika. Artinya kinerja atau prestasi merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu, jelas bahwa kinerja adalah ukuran hasil dari suatu aktivitas unit kerja dalam masa tertentu dalam rangka menilai kemampuannya
3. Membuat target kinerja. Target kinerja kemudian akan dikembangkan sebagai standar kerja di kemudian harinya. Pembuatan target kinerja yang jelas diharapkan dapat memengaruhi motivasi kerja, karena apabila target yang diinginkan dapat dengan jelas tergambar akan memudahkan para personil untuk membuat tahapan untuk mencapai tujuan tersebut dan selanjutnya memberikan motivasi untuk mencapai tujuan.
4. Membuat skema hadiah dan hukuman (reward and punishment). Pemberian hadiah dan hukuman merupakan elemen terakhir dari sistem pengendalian berorientasi hasil ini. Hadiah dapat bisa berbentuk macam-macam seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, kesempatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu, dan masih banyak lagi. Sementara hukuman dapat berupa penurunan pangkat, gaji,

bahkan yang terberat bisa sampai pemecatan. Pemberian skema hadiah dan hukuman ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan peringatan kepada para personil. Namun terkadang pemberian skema hadiah dan hukuman dapat membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman dan menjadi hal yang cukup sensitif, hal ini terutama disebabkan oleh kurang jelasnya aturan main dalam pemberian hadiah dan hukuman tersebut. Sehingga dibutuhkan aturan yang jelas dan objektivitas dalam menilai seseorang berkaitan dengan pemberian hadiah dan hukuman.

Sejalan dengan hal itu, peneliti memilih teori implementasi kebijakan dari Merchantt and Stade karena peneliti menganggap bahwa teori tersebut memiliki keterkaitan dan relevansi dengan fenomena yang ada di lapangan. Sejalan dengan penjelasan beberapa dimensi atau variabel yang mempengaruhi keberhasilan pengendalian hasil menurut Merchant and Stade di atas peneliti dapat mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan pengendalian yaitu didorong oleh dimensi-dimensi guna menunjang keberhasilan pengendalian hasil tersebut. Dimensi-dimensi tersebut diantaranya yaitu: Pendefinisian dimensi kinerja, Mengukur Kinerja, Membuat target kinerja, Membuat Skema hukuman.

Secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi utama dari pengendalian adalah menciptakan suatu mekanisme operasional dan tata kerja yang baik dalam suatu organisasi sehingga dapat menekan dan menghindari kesalahan-kesalahan dan penyelewengan-penyelewengan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari perencanaan dan penggunaan umpan balik agar tujuan organisasi dicapai secara total. Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Jadi, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melakukan pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk menjamin

bahwa operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan beroperasi dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, penelitian menggunakan tipe penelitian secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Rukajat, (2018) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.

PEMBAHASAN

Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir di Kota Cimahi tidak selalu berjalan dengan lancar, banyaknya hambatan yang dilakukan oleh pengendara yang roda empat maupun roda dua menjadi sebuah permasalahan bagi instansi yaitu Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Rencana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir belum sesuai dengan rencana, dikarenakan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran parkir belum membuat jera bagi pengendara roda empat maupun roda dua.

Mengacu dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran bahwa pemerintah daerah perlu mengutamakan ketertiban dan kepentingan umum dan tidak mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, sedangkan Kota Cimahi masih banyak pengendara yang tidak tertib dan mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, makda dari itu penyelenggaraan perparkiran harus dilakukan secara bertahap dan semestinya dikelola dengan baik.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan dalam penertiban parkir di Kota Cimahi. Dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang memiliki peran untuk menjalankan sebuah

penyelenggaraan atau pengendalian tersebut. Oleh karenanya, untuk mendalami penelitian tentang Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Di Kota Cimahi, peneliti menggunakan teori menurut Merchant dan Stade (2011 dalam Mulyani, 2018:1.14) bahwa ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi Pengendalian Penyelenggaraan, diantaranya:

1. Dimensi Pendefinisian Kinerja

Aspek:

- a. Kemampuan Kerja
- b. Kompetensi (Competency)
- c. Disiplin

2. Dimensi Mengukur Kinerja

Aspek:

- a. Menetapkan Tujuan
- b. Mengukur tingkat capaian dan tujuan

3. Dimensi Membuat Target Kinerja

Aspek:

- a. Relevansi
- b. Fleksibilitas

4. Dimensi Membuat Skema Hukuman

Aspek:

- a. Tipe Hukuman
- b. Proses

Dimensi dan aspek tersebut digunakan oleh peneliti dalam menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan dalam penertiban parkir di Kota Cimahi, peneliti melakukan observasi dan wawancara sebagai berikut:

Dimensi Pendefinisian Kinerja

Dalam pelaksanaan tugas tentunya Dinas Perhubungan Kota Cimahi harus memiliki kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh pegawainya, dalam melaksanakan sebuah tugas pokok dan fungsinya harus dengan

tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Kinerja bisa dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi, kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam satu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam satu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang dimaksudkan disini adalah pelaksanaan hasil pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam suatu organisasi.

Dimensi mengukur kinerja

Mengukur kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang maupun sekelompok organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, sesuai dengan moral dan etika. Artinya kinerja atau prestasi merupakan catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu, jelas bahwa kinerja adalah ukuran hasil dari suatu aktivitas unit kerja dalam masa tertentu dalam rangka menilai kemampuannya

Dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam penertiban parkir di Kota Cimahi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi juga harus memiliki pengukuran kinerja kepada pegawainya, bagaimana cara mengukur kinerja dari pegawainya yang harus memiliki sebuah target untuk mencapai sebuah kinerja. Menurut Bernardin & Russell (1993) Kinerja karyawan sebagai *quantity of work*, adalah yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Kinerja seseorang juga tercermin dari kemampuannya mencapai persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan atau yang dijadikan standar

Dimensi Membuat Target Kinerja

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas perhubungan Kota Cimahi harus memiliki target kinerja yang harus dimiliki oleh petugasnya, oleh karena itu target kinerja akan dikembangkan sebagai standar kerja di kemudian harinya. Pembuatan target kinerja yang jelas diharapkan dapat memengaruhi motivasi kerja, karena apabila target yang diinginkan dapat dengan jelas tergambar akan memudahkan para personil untuk membuat tahapan untuk mencapai tujuan tersebut dan selanjutnya memberikan motivasi untuk mencapai tujuan

Dimensi Membuat Skema Hukuman

Membuat skema hukuman (atau sistem hukuman) yang adil dan efektif memerlukan pertimbangan terhadap berbagai aspek, agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu mendidik, memberi efek jera, dan menegakkan keadilan, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam membuat skema hukuman, skema hukuman harus mempertimbangkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan, apakah itu pelanggaran ringan, sedang, atau berat, hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan atau dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Artinya, hukuman yang dijatuhan tidak boleh terlalu ringan untuk pelanggaran berat atau terlalu berat untuk pelanggaran ringan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan dalam penertiban parkir di kota cimahi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya dilihat dari dimensi membuat target kinerja yang dilakukan oleh Dinas khusunya membuat target kinerja yang relevan dan fleksibilitas dalam kemampuan kinerja terkait pengendalian penyelenggaraan perparkiran oleh dinas perhubungan dalam penertiban parkir di kota cimahi ini belum berjalan dengan maksimal. Dilihat dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan masih banyak masyarakat atau pengendara kendaraan mobil masih tidak tertib dalam larangan parkir di kota cimahi. Fasilitas parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam melaksanakan penyelenggaraan parkir tersebut berjalan cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dari segi kantong parkir yang kurang lahan karna banyak sekali pemetaan atau pembangunan di Kota Cimahi

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, R. (2016). Pembinaan Pengawasan Dan Pengendalian Perparkiran Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi Dibidang Perhubungan. *Institutional Repositories & Scientific Sournals* <http://repository.unpas.ac.id/12240/>.
- Kurnia, R. (2021). *Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Pengendalian dan Pengawasan Parkir Liar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung.
- Lase, W. J., Widodo, J., & Radjikan. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran dalam Meminimalisir Parkir Liar di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 366–373.
- Ramadhan, R. (2024). Efektivitas Penertiban Parkir Liar Kota Surabaya Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2019. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4(6).
- Sandra, C. (2024). Peran Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Parkir Pada Ruang Manfaat Jalan di Kota Palembang. In *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* https://repository.unsri.ac.id/141817/3/RAMA_74201_02011182025008_0012046302_0027098104_01_front_ref.pdf.
- Sujarwo, A. P. P. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan: studi kasus penanganan penertiban parkir liar di Kota Bandung oleh Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dinas Perhubungan Kota Bandung*). Universitas Katolik Parahyangan
- Mulyani. (2018). *Sistem Pengendalian Manajemen* (3 ed.). Salemba Empat.
- Munadi, A., Budiman, A., & Hasbiyah, S. (2024). Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Penertiban parkir Liar di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Pasar Induk Amuntai dan Pasar Unggas). *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 408–418.

- Fattah, N. (2007). *Landasan Pengendalian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Heidjrachman, & Husnan, S. (2000). *Manajemen Personalia* (4 ed.). BPFE UGM.
- Sabardi. (2001). *Manajemen Pengantar*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.